

Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah

Devi Astuti

Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya
devituti12@gmail.com

Alexandra Hukom

Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya
alexandra.hukom@feb.upr.ac.id

Abstract:

Due to the variation in resources and speed of development between regions at the time it was first implemented, disparities between regions were unavoidable. As a result of uneven economic growth, inequality arises. The purpose of this study was to examine the relationship between the GRDP, HDI, and labor variables on the focus of income in Central Kalimantan. This research methodology uses quantitative methods to study a topic through the use of previously collected data. Income disparity is not significantly affected by the Gross Regional Domestic Product (GRDP) variable and the Human Development Index (IPM) variable. While the labor variable has a significant effect on income inequality. As a result, there has been little or no change in the level of economic tension. This shows that Central Kalimantan has not been able to adequately manage the regional economy.

Keywords: *Income Inequality, GRDP, HDI, Labor*

Abstrak

Karena variasi sumber daya dan kecepatan pembangunan antar daerah pada saat pertama kali dilaksanakan, ketimpangan antar daerah tidak bisa dihindari. Akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, muncullah ketimpangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara variabel PDRB, IPM dan tenaga kerja terhadap kesenjangan pendapatan di Kalimantan Tengah. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajari suatu topik melalui penggunaan data yang dikumpulkan sebelumnya. Disparitas pendapatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. Akibatnya, tidak banyak atau bahkan tidak ada perubahan dalam tingkat kesenjangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah telah belum mampu mengelola perekonomian daerah secara memadai.

Kata Kunci: *Ketimpangan Pendapatan, PDRB, IPM, Tenaga Kerja*

PENDAHULUAN

Karena variasi sumber daya yang tersedia dan kecepatan upaya pembangunan daerah yang dilakukan, akan selalu ada kesenjangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah yang sangat maju dan daerah yang kurang berkembang. Tambunan berpendapat bahwa tempat-tempat dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga membuat mereka lebih kaya secara proporsional dibandingkan dengan daerah-daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang rendah. Hal ini karena disparitas pendapatan daerah terkait dengan konsentrasi ekonomi. (Irwanto & Noviandari, 2019).

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan kesenjangan kekayaan yang sangat besar. Tingkat kemiskinan dan pengangguran keduanya meningkat seiring dengan tingkat perbedaan pendapatan. Data BPS Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi provinsi dapat diukur dari perbedaan antara PDRB, tingkat lapangan kerja, dan jumlah penduduk.

Tabel 1. Indeks Gini Rasio Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

KAB/KOTA	TAHUN					RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kalimantan Tengah	0,342	0,336	0,329	0,323	0,319	0,3298
Kotawaringin Barat	0,306	0,308	0,333	0,317	0,315	0,3158
Kotawaringin Timur	0,335	0,299	0,323	0,325	0,292	0,3148
Kapuas	0,328	0,344	0,316	0,312	0,303	0,3206
Barito Selatan	0,322	0,297	0,313	0,286	0,309	0,3054
Barito Utara	0,314	0,309	0,337	0,308	0,301	0,3138
Sukamara	0,357	0,33	0,300	0,290	0,322	0,3198
Lamandau	0,303	0,28	0,296	0,321	0,318	0,3036
Seruyan	0,28	0,289	0,260	0,262	0,292	0,2766
Katingan	0,301	0,274	0,252	0,230	0,250	0,2614
Pulang Pisau	0,266	0,357	0,302	0,262	0,288	0,295
Gunung Mas	0,309	0,302	0,279	0,278	0,262	0,286
Barito Timur	0,317	0,339	0,333	0,297	0,294	0,316

Murung Raya	0,32	0,309	0,280	0,308	0,260	0,2954
Palangka Raya	0,366	0,357	0,340	0,362	0,383	0,3616

Sumber : BPS Kalteng, 2022

Rasio Gini diukur antara 0 dan 1. Jika rasio pendapatan rata-rata rumah tangga terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga mendekati satu, maka disparitas pendapatan semakin besar. Namun, jika mendekati nol, pendapatan didistribusikan lebih merata atau hampir merata di seluruh rumah tangga. Oshima mengusulkan perincian Gini Ratio dalam tiga tahap. Ketimpangan dianggap rendah jika Rasio Gini kurang dari 0,3, tinggi jika skornya lebih dari 0,5 dan sedang jika antara 0,3 dan 0,5.(Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2016).

Berdasarkan statistik di atas, sebagian besar Kalimantan Tengah masih memiliki koefisien Gini sebesar 0,3 atau lebih, yang menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak merata di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data statistik yang ada, Kota atau Kabupaten Palangka Raya memiliki tingkat ketimpangan yang paling besar, dengan nilai indeks rasio (0,361667). Dengan demikian, Kalimantan Tengah sebagai provinsi belum berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan pendapatan memiliki beberapa akar penyebab. Maka, tujuan dari riset ini adalah ingin mempelajari apakah dan bagaimana indikator ekonomi seperti PDB, IPM, dan tenaga kerja berkontribusi terhadap disparitas pendapatan yang sudah tinggi di Kalimantan Tengah.

KAJIAN TEORITIS

Teori Ketimpangan Pendapatan

Disparitas pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang memerlukan pertimbangan yang cermat karena merupakan proksi dari kemiskinan relatif yang diukur dengan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan minimal jika setiap orang di suatu negara atau wilayah memperoleh keuntungan yang sama dari pembangunan ekonomi, baik dalam hal pendapatan pribadi maupun kepemilikan alat produksi. Negara-negara yang lebih jauh menuju kemakmuran memiliki perbedaan pendapatan yang lebih kecil daripada negara-negara yang masih berada di jalur tersebut. Kekayaan dan pendapatan cenderung didistribusikan secara lebih adil dan dengan lebih sedikit ketimpangan di negara maju dan berpenghasilan tinggi.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dalam dua skala yang berbeda: ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif, seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2006). Ketimpangan absolut adalah gagasan bahwa ketimpangan dapat dikuantifikasi oleh faktor-faktor yang memiliki nilai absolut. Sebaliknya, ketimpangan relatif adalah metode untuk mengukur perbedaan distribusi pendapatan dengan membandingkan bagian dari total pendapatan yang diperoleh individu atau kelompok dengan keseluruhan komunitas.

Smith dan Todaro (2006) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai "sejauh mana individu dalam suatu komunitas memiliki tingkat akses yang berbeda, atau partisipasi dalam, kelompok pendapatan nasional." Karena orang kaya memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menabung daripada orang miskin, distribusi pendapatan yang lebih tidak merata mengarah pada tingkat tabungan agregat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Gini Rasio

Indeks Gini, sering dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, dirancang oleh ahli statistik Italia Corrado Gini dan awalnya diterbitkan pada tahun 1912 (Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia, 2018). Distribusi pendapatan total masyarakat yang tidak merata merupakan gejala yang dikenal dengan ketimpangan pendapatan. Indeks Gini, yang didasarkan pada Kurva Lorenz, digunakan oleh Biro Statistik Nasional. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang menunjukkan proporsi kumulatif populasi berdasarkan seberapa merata variabel tertentu (seperti pendapatan) didistribusikan relatif terhadap distribusi yang

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

seragam. Indeks Gini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi distribusi kekayaan di negara mereka (Ii & Pustaka, 2018). Menurut BPS (2017), berikut adalah rumus penentuan nilai Gini Ratio atau Indeks Gini.

Keterangan :

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

FC_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

FC_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i – 1).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Istilah "nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu negara" digunakan untuk menggambarkan Produk Domestik Bruto suatu negara. menurut Biro Pusat Statistik. Cara lain untuk melihatnya adalah sebagai seluruh nilai uang dari produk dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah. PDRB adalah ukuran pertumbuhan ekonomi yang berguna yang memperhitungkan inflasi dan stabilitas harga selama periode waktu dan wilayah geografis tertentu.

1. Ukuran yang bermanfaat dari potensi dan struktur ekonomi suatu wilayah adalah PDRB-nya dengan harga berlaku, yang menampilkan nilai tambah produk dan layanan yang dievaluasi dengan harga berlaku.
2. Ketika inflasi diperhitungkan, kenaikan PDB riil dari satu tahun ke tahun berikutnya dapat dihitung (Sukirno, 2011).

Pendekatan produksi, metode pendapatan, dan teknik pembelanjaan semuanya dapat digunakan untuk memperkirakan PDB.

1. Dengan Metode Produksi, PDRB ditentukan sebagai nilai pasar total produksi suatu wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Berdasarkan Pendekatan Pendapatan, PDRB suatu wilayah adalah nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di wilayah tersebut selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Konsumsi swasta (termasuk pengeluaran oleh rumah tangga dan organisasi nirlaba), konsumsi publik, pertumbuhan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor bersih adalah lima komponen permintaan akhir berdasarkan metodologi Pengeluaran dan PDRB (ekspor bersih adalah ekspor) . tidak termasuk impor (Sukirno, 2011)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Di antara faktor-faktor yang masuk ke peringkat HDI suatu negara termasuk harapan hidup, tingkat melek huruf, dan PDB per kapita. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) mengklasifikasikan negara sebagai maju, berkembang, atau tidak berkembang berdasarkan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Negara-negara HDI rendah mungkin ingin mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap nutrisi, kesehatan, dan pendidikan karena penekanan HDI pada aspek pembangunan kualitatif ini (Ilmu et al., 2015).

Meskipun tidak dapat mengukur semua aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengevaluasi kemajuan di tiga bidang yang dianggap sebagai indikator yang dapat diandalkan dari kemampuan mendasar masyarakat. Umur panjang dan sehat, kemampuan untuk belajar dan menggunakan bakat-bakat baru, dan sarana untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga adalah tiga kemampuan mendasar (Indonesia, 2008).

Indeks Pembangunan Manusia (UNDP) Program Pembangunan PBB untuk melacak peningkatan standar hidup masyarakat (HDI). Pembangunan manusia diukur dengan gabungan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (a long and healthy life) Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (life expectancy at age 0: eo)
2. Pengetahuan (knowledge) Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu : A. Harapan Lama Sekolah (HLS) B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Standar Hidup Layak (decent standard of living) Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. (Moshinsky, 1959)

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) hanya menggunakan tiga indikator untuk menghitung standar hidup suatu negara. Diantaranya adalah sebagai berikut:

IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tenaga Kerja

$$IPM = (Index X1 + Index X2 + Index X3) / 3$$

Keterangan :

X1 = Lama Hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

Ada dua pengertian dari istilah “Sumber Daya Manusia” (SDM). Untuk memulai, SDM dapat dilihat sebagai upaya atau layanan pekerjaan yang terkait dengan produksi. Sumber daya manusia kedua, berkaitan dengan orang-orang yang dapat menyediakan jasa atau tenaga kerja. Kemampuan kerja didefinisikan sebagai kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan yang bernilai ekonomi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Tenaga kerja mengacu pada potensi manusia yang diwakili oleh penduduk usia kerja (Herawati & Sasana, 2013).

Menurut UU No. 14 Tahun 1969, angkatan kerja mencakup setiap orang yang dapat bekerja, baik pada majikan maupun pada diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (artikel pertama). Karena dalam kedua situasi itu tubuh dan otak para pekerja itu sendiri adalah alat produksi utama, frasa ini mendefinisikan "tenaga kerja" untuk mencakup baik pekerja maupun kontraktor independen. Diketahui bahwa variabel yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Masruri, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis informasi yang terkumpul dalam bentuk data panel. Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang menjadi dasar persentase dan rincian riset ini adalah data Gini rasio, PDRB, IPM dan Tenaga kerja yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Persamaan berikut digunakan oleh alat analisis untuk regresi data panel:

$$KDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TK + e_{it}$$

Persamaan berikut digunakan oleh alat analisis untuk regresi data panel

Dimana :

KDP : Ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini)

PDRB = Produk domestik regional bruto

IPM = Indeks pembangunan manusia

β_0 : Intersep

β_1 hingga β_3 : Koefisien

e : standard error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Fixed Effects (FEM) dipilih sebagai yang paling sesuai untuk penelitian ini setelah model regresi data panel dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

Tabel 2. Hasil estimasi regresi data panel dengan Metode FEM

Y	=	a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + eit		
Y	=	0.043051 - 0.000859 X1 + 0.011631X2 + 0.003774 + eit		
t hit	=	(-0.799873)	(1.215608)	(3.596987)*
F hit	=	(7.726858)*		
R ² adjusted	=	(0.697382)*		

Keterangan : *) Signifikan

Sumber : Data Olah

Untuk distribusi probabilitas (0,000000) lebih kecil dari 0,05, nilai F yang hitung adalah 7,726858. Ini menyiratkan bahwa PDRB, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja, terhadap disparitas distribusi pendapatan semuanya memiliki peran.

Koefisien determinasi yang diukur dengan Adjusted R2 adalah 0,697382. Jelas dari sini bahwa perubahan PDRB dan HDI antara tahun 2018 sampai 2022 akan menyebabkan 69% perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Gini Rasio). Sedangkan 31% dari variasi dapat dikaitkan dengan pengaruh dari variabel luar.

1. PDRB Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Wie (Rinjani, 2018) berpendapat bahwa jika masalah kemiskinan dan pengangguran suatu negara tidak ditangani, ekspansi ekonomi yang cepat dapat menyebabkan ketimpangan yang berlebihan dalam distribusi pendapatan.

Tabel 2 merangkum hasil analisis statistik yang menjelaskan mengapa koefisien variabel PDRB negatif dan tidak signifikan secara statistik dalam memprediksi ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Nilai t sebesar -0,799873 menunjukkan probabilitas

sebesar $0,4271 > = 0,05$ untuk variabel PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB hanya berdampak kecil pada sejauh mana orang dibayar secara tidak setara. Terlihat jelas bahwa peningkatan output di Kalteng belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ideal karena dampak PDRB terhadap disparitas pendapatan tidak besar. Konsisten dengan studi sebelumnya, yang satu ini juga demikian (Firmansyah & Achmad, 2022).

2. IPM Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Becker (Rinjani, 2018) , yang menyelidiki dampak sekolah terhadap pembangunan ekonomi, menemukan bahwa HDI mengurangi ketimpangan pendapatan dan output pekerja meningkat seiring dengan tingkat pendidikan mereka.

Dengan nilai t sebesar 1,215608, maka variabel IPM pada tabel di atas memiliki probabilitas sebesar 0,2291 yang lebih besar dari 0,05. Berbeda dengan penelitian Becker, studi ini menemukan bahwa HDI memiliki dampak positif dan secara statistik tidak relevan terhadap disparitas distribusi pendapatan (Rinjani, 2018) . Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Tengah belum menyadari potensi penuhnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, karena HDI tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap masalah tersebut.

3. Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Danawati dkk (Arsyillah, 2019) mengklaim bahwa kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja. Dengan asumsi adanya korelasi antara jumlah tenaga kerja dan produktivitasnya, maka diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jika produktivitas tumbuh seiring dengan produksi yang lebih tinggi, hal itu berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Nilai t untuk variabel tenaga kerja adalah 3,596987, dan probabilitas yang terkait sebesar 0,0007 lebih kecil dari 0,05, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa TPAK memiliki dampak yang cukup besar dan menguntungkan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini konsisten dengan orang lain (Arsyillah, 2019)

KESIMPULAN

Temuan berikut diambil dari kajian pengaruh PDB, IPM, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah antara tahun 2018 dan 2022.

1. Ketimpangan pendapatan Kalimantan Tengah dipengaruhi secara negatif oleh variabel PDRB, tetapi pada tingkat yang dapat diatasi. Terdapat pengaruh sebesar -0,799873 PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa skor PDRB yang tinggi mungkin dihasilkan dari kombinasi faktor-faktor, termasuk adanya sejumlah besar individu dengan pendapatan tinggi dan jumlah yang relatif kecil dari orang-orang dengan pendapatan rendah. Disparitas pendapatan juga dapat disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang dihasilkan dari sektor ekonomi yang berbeda.
2. Ketimpangan pendapatan Kalimantan Tengah dipengaruhi secara positif dan marginal oleh variabel IPM. Pengaruh IPM terhadap disparitas pendapatan sebesar 1,256080. Hal ini terjadi karena angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Lebih tinggi tingkat pendidikan akan mengarah pada pendapatan yang lebih besar dan output yang meningkat.
3. Disparitas pendapatan Kalimantan Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh komponen tenaga kerja. Pengaruh TPAK terhadap disparitas pendapatan sebesar 3,596987. Karena diharapkan, jika peningkatan jumlah tenaga kerja diimbangi dengan peningkatan produktivitas, Ketika persentase populasi yang aktif bekerja meningkat, output akan meningkat untuk memenuhi permintaan. Pendapatan dan ketimpangan pendapatan dapat diuntungkan dari produktivitas yang lebih tinggi jika output yang dihasilkan juga meningkat.

Saran

Sehubungan dengan diskusi di atas, penulis mengusulkan sejumlah perubahan pada pemerintah dan para sarjana masa depan. Berikut beberapa rekomendasinya:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Kalimantan Tengah memiliki PDRB per kapita yang tinggi tetapi juga memiliki kesenjangan pendapatan yang besar di antara penduduknya. Untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, pemerintah harus memprioritaskan langkah-langkah yang secara langsung menguntungkan masyarakat miskin, seperti

meningkatkan PDB daerah melalui program pajak dan subsidi serta memperkuat sektor berbasis rakyat. Dengan berfokus pada penguatan UKM (usaha kecil dan menengah), mengembangkan hotspot pariwisata, dan memperluas perusahaan petani.

- b. Disparitas pendapatan antar daerah secara positif dan marginal dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Akibatnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan pengakuan publik yang lebih besar terhadap nilai pendidikan sebagai investasi manusia. Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM dapat dicapai melalui fokus pemerintah pada sektor kesehatan dan pemajuan pendidikan vokasi di sektor industri.
 - c. Tenaga Kerja dapat menurunkan kemiskinan. Pemerintah diharapkan berfokus pada solusi untuk menghilangkan faktor-faktor yang memperlambat partisipasi angkatan kerja. Penciptaan lapangan kerja pemerintah dapat membantu mengentaskan kemiskinan di setiap provinsi jika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tinggi. Selain itu perbaikan SDM juga diperlukan, hal ini tentunya penting karena dengan SDM yang berkualitas maka seseorang mampu untuk mencari pekerjaan dan menambah produktivitas setiap individu
2. Bagi Peneliti berikutnya
- a. Disarankan menambahkan variabel atau indicator makro yang lain dengan jumlah data yang lebih bervariasi lagi agar hasil penelitian yang dihasilkan dapat dijadikan bahan perbandingan. Untuk meningkatkan temuan seseorang, juga disarankan untuk bereksperimen dengan berbagai pendekatan analitis.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyillah, R. M. (2019). Analisis Peran Pendidikan dan Ketenagakerjaan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017). *Skripsi*.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2016). Gini Rasio 2016. *Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta*, 1–46.
- Firmansyah, U., & Achmad, E. (2022). *PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera*. 11(1), 9–14.
- Herawati, N., & Sasana, H. (2013). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin Dan Umur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Shuttlecock Kota Tegal. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2018). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Indeks Gini. 2017*, 13–26.
- Ilmu, J., Bisnis, A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. *Blog.Ub.Ac.Id*, 135030201111123, 1–12. <http://blog.ub.ac.id/anikrotul/files/2013/03/MAKALAH-SIM-FIX-1.docx>
- Indonesia, U. I. (2008). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim*. 18–26.
- Irwanto, & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(1), 110–118. <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/283>
- Masruri. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Jurnal Ilmiah*, 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3442>
- Rinjani, M. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2016. *Skripsi, 2006*, 2. <http://repository.umy.ac.id>
- Sukirno. (2011). Teori PDRB. *Teori Produk Domestik Regional Bruto*, 331(02), 12–48. [http://repository.radenfatah.ac.id/6956/2/Skripsi BAB II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/6956/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf)